

LAKIP



POLITEKNIK
IMIGRASI

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)

POLITEKNIK IMIGRASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta pelaksanaan *good governance*, Politeknik Imigrasi pada akhir tahun 2020 ini telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 sampai selesai dengan baik, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Imigrasi Tahun 2020 ini merupakan LAKIP *perdana* atas deskripsi hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, kami ucapkan terima kasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran yang akan datang.

Depok, 30 Desember 2020
Direktur Politeknik Imigrasi

TTD

Anggiat Napitupulu, S.S., M.Si
NIP. 197203091994032001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| DAFTAR GRAFIK..... | 4 |
| DAFTAR TABEL..... | 5 |
| BAB I | 6 |
| A. Latar Belakang | 6 |
| B. Visi, Misi dan Tujuan..... | 8 |
| C. Tugas dan Fungsi Politeknik Imigrasi | 10 |
| D. Struktur Organisasi Politeknik Imigrasi | 11 |
| E. Sumber Daya Manusia | 16 |
| F. Peran Strategis Politeknik Imigrasi..... | 18 |
| G. Sistematika Laporan..... | 23 |
| BAB II | 24 |
| A. Rencana Strategis (Renstra) | 24 |
| B. Perjanjian Kinerja | 26 |
| BAB III | 28 |
| A. Capaian Kinerja | 28 |
| B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Politeknik Imigrasi | 30 |
| C. Kendala atau Hambatan dan Langkah Penyelesaiannya | 33 |
| D. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politeknik Imigrasi | 34 |
| E. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Politeknik Imigrasi..... | 38 |
| F. Prestasi Kinerja Politeknik Imigrasi | 48 |

| | |
|-------------------------------|----|
| BAB IV..... | 52 |
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Rencana Tindak Lanjut..... | 53 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|---|----|
| Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 16 |
| Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan | 16 |
| Grafik 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... | 17 |
| Grafik 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 17 |
| Grafik 3.3 Rekapitulasi Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020..... | 36 |
| Grafik 3.4 Rekapitulasi Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2020..... | 37 |
| Grafik 3.5 Perbandingan Capaian Lulusan Alumni Politeknik Imigrasi Tahun 2019 dan Tahun 2020..... | 39 |
| Grafik 3.6 Jumlah Taruna Politeknik Imigrasi Tahun 2020..... | 43 |
| Grafik 3.7 Anggaran Belanja Politeknik Imigrasi 2020 | 44 |
| Grafik 3.8 Realisasi Anggaran Per Belanja Politeknik Imigrasi Tahun 2020 | 44 |
| Grafik 3.9 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Politeknik Imigrasi Tahun 2020..... | 45 |
| Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran Politeknik Imigrasi Tahun 2019 dan Tahun 2020 | 46 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Bidang Penelitian Politeknik Imigrasi Tahap I | 19 |
| Tabel 1.2 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah DTPS Tahun 2020 | 20 |
| Tabel 1.3 Penyelenggaraan dan Luaran Penelitian DTPS Tahun 2020 | 20 |
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Politeknik Imigrasi Tahun 2020 | 26 |
| Tabel 3.1 Capaian Kinerja Politeknik Imigrasi Tahun 2020 | 28 |
| Tabel 3.2 Capaian Kinerja Politeknik Imigrasi Tahun 2019 | 28 |
| Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Politeknik Imigrasi Tahun 2019 dan Tahun 2020. | 29 |
| Tabel 3.4 Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Politeknik Imigrasi Tahun 2020..... | 29 |
| Tabel 3.5 Realisasi Capaian Politeknik Imigrasi Tahun 2020 | 37 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan dua dari agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sejalan dengan pembangunan aparatur negara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan melanjutkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025, berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan 8 area perubahan di dalam Reformasi Birokrasi Nasional, meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Mengacu kepada berbagai hal tersebut, yang dituangkan dalam Narasi RPJMN 2020-2024, maka dengan sendirinya sumber daya manusia aparatur di bidang Hukum dan HAM sangat dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi

dan profesionalismenya sebagai aparatur di bidang Hukum dan HAM, dalam upaya mendukung Reformasi Birokrasi Nasional.

Politeknik Imigrasi selanjutnya dalam Peraturan Menteri disebut Poltekim merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, tanggal 02 Nopember 2006, ditugaskan melakukan penyelenggaraan pendidikan vokasi, baik secara klasikal maupun *e-learning* bagi peserta didik Politeknik Imigrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2126), dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi.

Selanjutnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Politeknik Imigrasi perlu menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan vokasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya pada Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Politeknik Imigrasi Tahun 2020 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dibebankan Kementerian Hukum dan HAM kepada Politeknik Imigrasi.

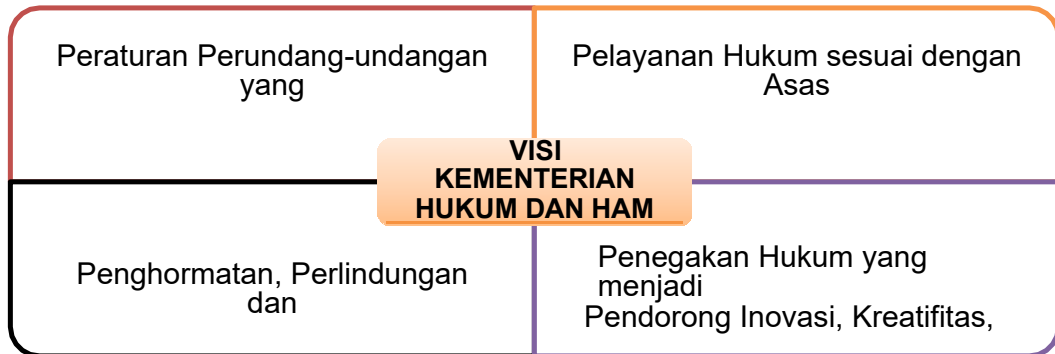
B. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

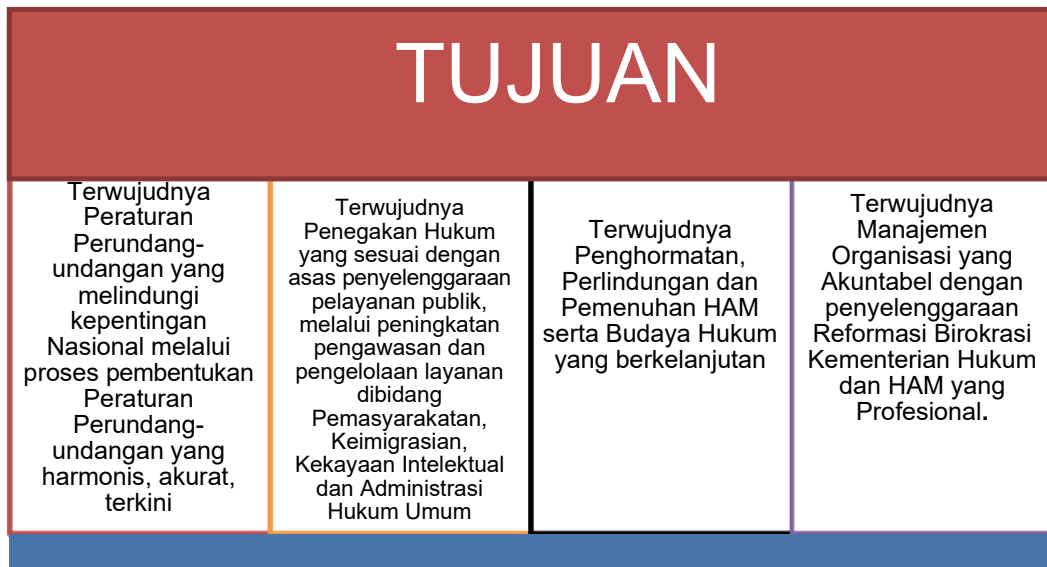
Dalam konteks organisasi Politeknik Imigrasi yang merupakan unit kerja BPSDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Visi dan Misi yang dituangkan dalam rencana strategis ini akan identik dan mengikuti Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Sejalan dengan penetapan visi Kementerian tersebut, Politeknik Imigrasi di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan HAM akan menjalankan peran serta menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian visi Kementerian khususnya dalam segi penyiapan SDM peserta didik yang siap pakai, Politeknik Imigrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat. Sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM dituntut untuk menjadi pegawai yang handal dan profesional serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik sehingga para pegawai yang bertugas dapat memberikan pelayanan yang optimal baik pelayanan internal kepada peserta didik maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat umum.

Visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu mewujudkan :



Tujuan yang ingin dicapai dari 4 (empat) misi adalah :



C. Tugas dan Fungsi Politeknik Imigrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Tugas Politeknik Imigrasi

Poltekim mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. Penyelenggaraan Poltekim berdasarkan Falsafah Bhumi Pura Dharma Ksatria. Falsafah Bhumi Pura Dharma Ksatria mengandung makna:

- a. Bhumi Pura adalah pintu gerbang negara yang wajib dijaga sebagai perwujudan kedaulatan suatu negara;
- b. Dharma adalah kewajiban agar setiap peserta didik pada Politeknik Imigrasi dapat berbuat kebaikan dan mengamalkan visi dan misi Politeknik Imigrasi untuk mencapai suatu tujuan guna terciptanya suatu negara yang berdaulat;
- c. Ksatria adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan pengaman negara, serta fasilitator pembangunan yang berguna bagi negara dan masyarakat.

2. Fungsi Politeknik Imigrasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016, Politeknik Imigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
- b) Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian;
- c) Pelaksanaan penelitian;
- d) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan internal;
- f) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- g) Pelaksanaan administrasi akademik dan umum;
- h) Pengelolaan laboratorium, perpustakaan, sistem informasi, dan penerbitan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; dan
- i) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. Struktur Organisasi Politeknik Imigrasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Politeknik Imigrasi terdiri dari beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Direktur dan Wakil Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, peserta didik, alumni, tenaga administrasi dan pengelolaan administrasi Poltekim, serta membina hubungan dengan lingkungannya. Direktur dan Wakil direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktur dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, yaitu:

- a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik dan Peserta Didik (Wakil Direktur I);
merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi akademik dan peserta didik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum (Wakil Direktur II);
merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

2. Dewan Penyantun

Merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan Poltekim. Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat dan ahli dibidang keimigrasian yang diangkat oleh Direktur.

3. Senat

Merupakan unsur penyusun kebijakan Poltekim yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

4. Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal

Merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang penjaminan mutu pendidikan dan pengawasan internal. Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. Satuan Penjamin Mutu dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penjaminan dibidang kurikulum, mutu pendidikan, jumlah tenaga kependidikan, perkembangan prestasi akademik dan kepribadian peserta didik, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, dan tata laksana administrasi akademik, serta pengawasan dan pengendalian internal di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan barang milik negara.

5. Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik

Merupakan unsur pelaksana administrasi dibidang administrasi akademik dan peserta didik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur I. Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar;
- b. pelaksanaan administrasi akademik, peserta didik, dan alumni;
- c. penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan;
- d. pengelolaan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Akademik;

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program pendidikan serta bahan ajar, pelaksanaan administrasi akademik, dan pelaksanaan kerja sama.
- b. Subbagian Administrasi Peserta Didik.

mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi peserta didik dan alumni, penyiapan pelaksanaan praktik kerja lapangan, serta evaluasi dan pelaporan.

6. Bagian Administrasi Umum

Merupakan unsur pelaksana administrasi dibidang administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur II. Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan Administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata laksana; dan
- b. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan hubungan masyarakat.
- c. Bagian Administrasi Umum terdiri atas:
- d. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
- e. mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata laksana.
- f. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- g. mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara, dan hubungan masyarakat.

Bagian Administrasi Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan :
mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian , keuangan, dan tata laksana.
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga :
mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga , barang milik negara, dan hubungan masyarakat.

7. Program Studi

Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang merupakan dosen tetap yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur I. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat.

Program Studi terdiri atas:

- a. Program Studi Diploma Empat Hukum Keimigrasian;

- b. Program Studi Diploma Empat Manajemen Teknologi Keimigrasian;
- c. Program Studi Diploma Empat Manajemen Teknologi Keimigrasian; dan
- d. Program Studi Diploma Tiga Keimigrasian.

8. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh Wakil Direktur II. Kepala PPPM merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin kegiatan PPPM.

PPPM menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penelitian di bidang keimigrasian;
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

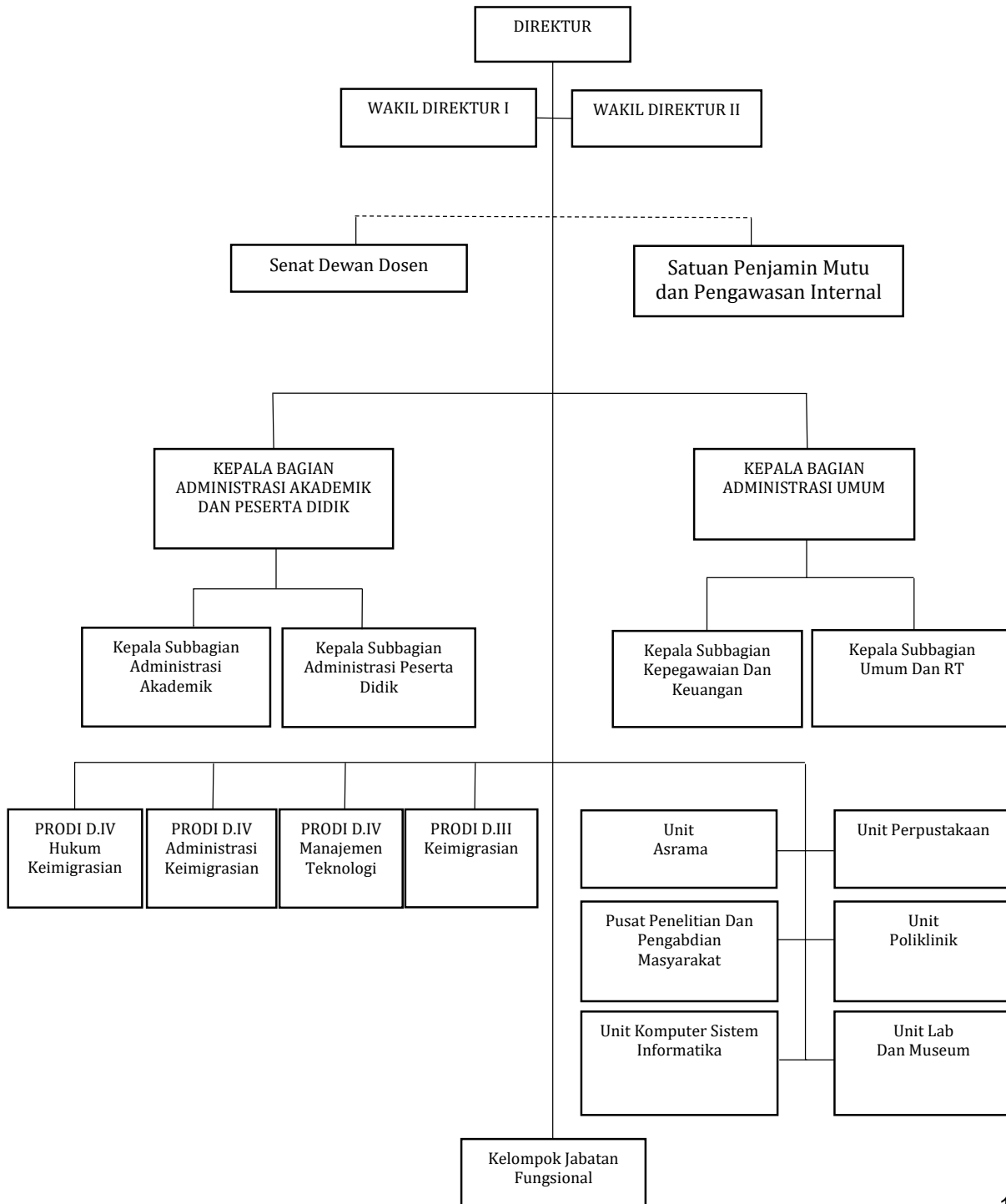
9. Unit Penunjang;

Merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Unit Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Unit Penunjang terdiri atas:

- a. Unit Asrama;
- b. Unit Perpustakaan;
- c. Unit Poliklinik;
- d. Unit Laboratorium dan Museum; dan
- e. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ketua Program Studi, Kepala Satuan, Kepala Pusat, Kepala Unit, dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur. Seluruh tugas, pokok

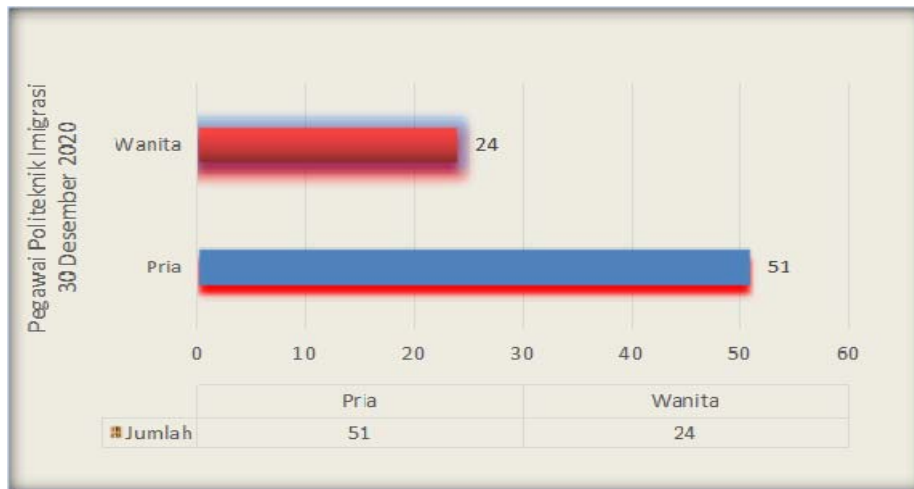
dan fungsi diatas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi. Struktur organisasi dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



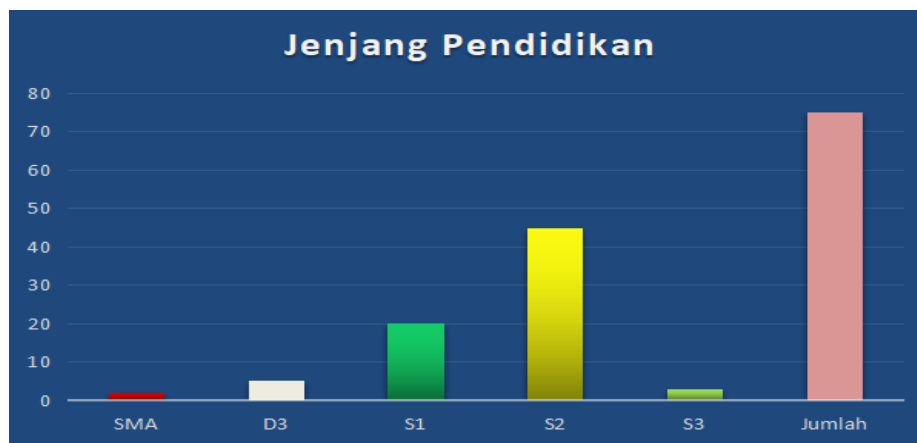
E. Sumber Daya Manusia

Politeknik Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 75 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda.

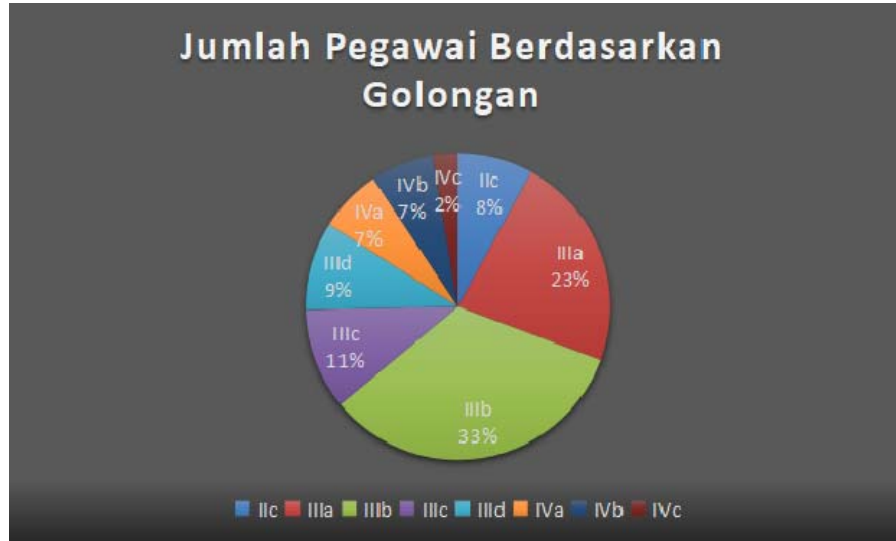
Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
 (Per 30 Desember 2020)



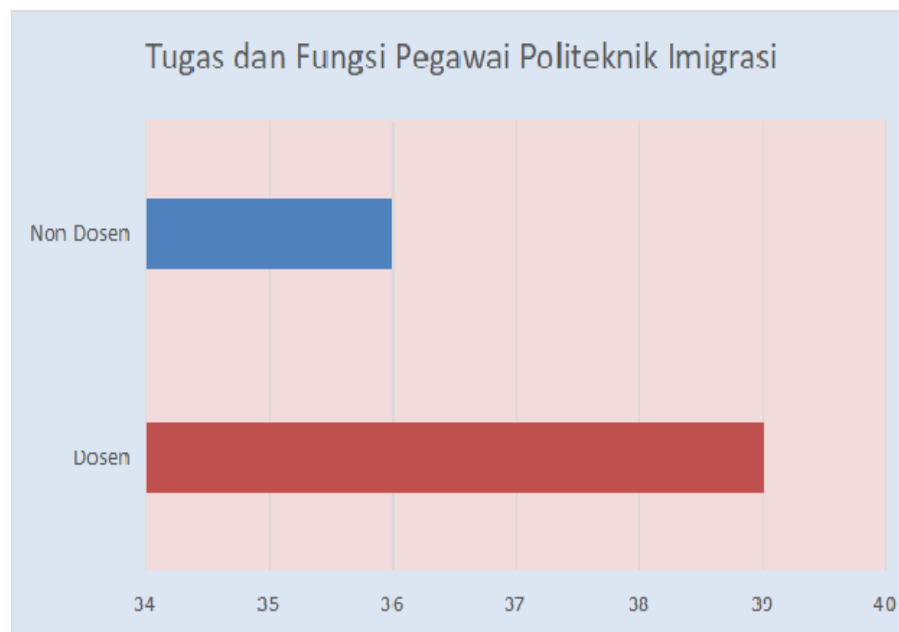
Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
 (Per 30 Desember 2020)



Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 (Per 30 Desember 2020)



Grafik 1.4
Jumlah Pegawai Tugas dan Fungsi
 (Per 30 Desember 2020)



F. Peran Strategis Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi mempunyai peranan strategis dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM, dan mengoptimalkan peran para Aparatur Penegak Hukum dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Pengasuhan



2. Penyelenggaraan Penelitian

| Komponen | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Tahun Berjalan | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Sumber Daya Penelitian | Dosen | Orang | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| | Peneliti Internasional | Orang | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Sumber Dana Pemerintah | Juta Rupiah | 800 | 50 | 75 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| | Sumber Dana non Pemerintah Termasuk Hasil Kerjasama | Juta Rupiah | 100 | - | 5 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | | - |
| Luaran Penelitian | Karya Ilmiah DTSP yang disitasi | Sitasi | 100 | 20 | 60 | 64 | 213 | 308 | - |
| | Modul yang Diterbitkan oleh DTSP | Dokumen | 10 | - | - | - | 8 | - | - |
| | Buku Ajar yang Diterbitkan oleh DTSP | Dokumen | 30 | - | 2 | 12 | 9 | 4 | - |
| | Buku Referensi yang Diterbitkan oleh DTSP | Dokumen | 30 | - | 3 | 14 | 8 | 5 | - |
| | Jurnal Ilmiah Internasional yang Diterbitkan oleh DTSP | Dokumen | 10 | - | - | 1 | 1 | 6 | - |
| | Jurnal Ilmiah Nasional yang Diterbitkan oleh DTSP | Dokumen | 70 | 1 | 7 | 29 | 26 | 12 | - |
| | Jurnal Ilmiah Nasional yang Diterbitkan oleh DTSP Melibatkan Peserta Didik | Dokumen | 10 | - | - | - | 7 | - | - |
| | Prosiding Internasional yang Diterbitkan oleh DTSP | Dokumen | 10 | - | - | 7 | 6 | - | - |
| | Prosiding Nasional yang Diterbitkan oleh DTSP | Dokumen | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Instrumentasi Jurnal Ilmiah | Pembuatan OJS bagi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) | Aplikasi | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Peningkatan Status Akreditasi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menjadi SINTA 4 | Dokumen | 1 | - | - | - | - | - | - |

Tabel 1.1
Bidang Penelitian Poltekim Tahap I (2016 – 2021)

Tabel 1.2
Jumlah Sitasi Karya Ilmiah DTSP (District Team Problem Solving)
(Google Scholar)

| No | Nama | Program Studi | Jumlah Sitasi |
|--------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| 1 | Agung S. Purnomo | Administrasi Keimigrasian | 2 |
| 2 | Andry Indrady | Manajemen Teknologi Keimigrasian | 1 |
| 3 | Bobby Briando | Manajemen Teknologi Keimigrasian | 25 |
| 4 | Budy Mulyawan | Administrasi Keimigrasian | 4 |
| 5 | Koesmoyo Ponco Aji | Keimigrasian | 1 |
| 6 | M. Alvi Syahrin | Hukum Keimigrasian | 567 |
| 7 | Maidah Purwanti | Hukum Keimigrasian | 1 |
| 8 | Pramella Y. Pasaribu | Hukum Keimigrasian | 16 |
| 9 | Priati | Manajemen Teknologi Keimigrasian | 13 |
| 10 | Ridwan Arifin | Administrasi Keimigrasian | 15 |
| 11 | Sri Kuncoro Bawono | Hukum Keimigrasian | 3 |
| 12 | Surya Pranata | Hukum Keimigrasian | 14 |
| 13 | Tony Mirwanto | Hukum Keimigrasian | 1 |
| 14 | Wilonotomo | Hukum Keimigrasian | 2 |
| Total | | | 665 |

Tabel 1.3
Penyelenggaraan dan Luaran Penelitian DTSP

| No | Komponen | Jumlah |
|--------------|--|------------|
| 1 | Modul yang Diterbitkan oleh DTSP | 8 |
| 2 | Buku Ajar yang Diterbitkan oleh DTSP | 27 |
| 3 | Buku Referensi yang Diterbitkan oleh DTSP | 30 |
| 4 | Jurnal Ilmiah Internasional yang Diterbitkan oleh DTSP | 8 |
| 5 | Jurnal Ilmiah Nasional yang Diterbitkan oleh DTSP | 75 |
| 6 | Jurnal Ilmiah Nasional yang Diterbitkan oleh DTSP Melibatkan Peserta Didik | 7 |
| 7 | Prosiding Internasional yang Diterbitkan oleh DTSP | 13 |
| 8 | Prosiding Nasional yang Diterbitkan oleh DTSP | 4 |
| Total | | 172 |

3. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

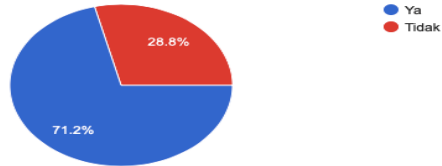
Peran Politeknik Imigrasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) hadir untuk memfasilitasi perubahan sosial masyarakat, dengan program kerja. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) dibentuk dengan SK Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.SM.10.03.18-0114 Tahun 2018. Berdasarkan surat keputusan tersebut di atas, fungsi utama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan visi dan misi Politeknik Imigrasi.

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimasa yang akan datang dilakukan melalui penekanan proses, hasil dan dampak dari kegiatan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kepedulian dan nilai yang mirip dengan Politeknik. Peningkatan kapasitas Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan seminar, workshop dan pelatihan dan juga dengan evaluasi dan monitoring yang didasarkan pada Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Penataan organisasi seperti penguatan kegiatan pusat studi lintas disiplin ilmu maupun penambahan staf administrasi juga dilakukan. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat juga mengembangkan sistem informasi berbasis web, sebagai sarana komunikasi dan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada masa yang akan datang, walaupun masih terdapat beberapa sistem, proses dan indikator yang masih perlu perbaikan. Pembinaan akan terus dilakukan terkait proses perencanaan, baik jangka pendek, menengah dan panjang. Pembuatan peta jalan dan tema yang lebih mendasar dibutuhkan tiap tahunnya sebagai panduan dan arahan bagi para dosen serta Taruna/Taruni yang hendak melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Berikut hasil survei yang dilakukan oleh PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) terkait kepuasan pengguna terhadap layanan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Poltekim.

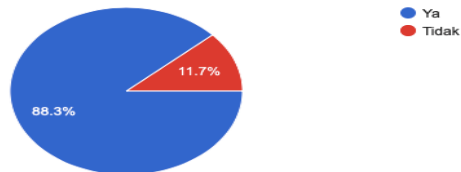
Apakah anda diikutsertakan dalam penentuan tema / topik penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Imigrasi?

111 responses



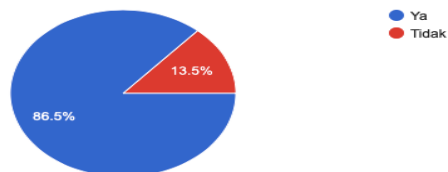
Apakah anda diberikan akses informasi dan layanan dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Imigrasi?

111 responses



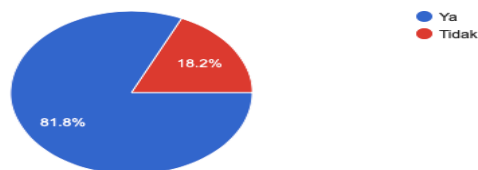
Apakah anda diikutsertakan dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Imigrasi?

111 responses



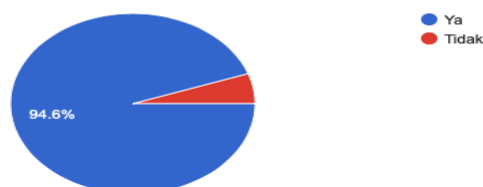
Apakah anda dapat mengakses hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Imigrasi?

110 responses



Apakah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Imigrasi bermanfaat bagi pengguna?

111 responses



G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Politeknik Imigrasi Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek peran strategis Politeknik Imigrasi, serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, sasaran kinerja pegawai, perjanjian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta perbandingan capaian kinerja . Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2020 terkait dengan tugas pokok dan tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tahun 2020 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Perjanjian



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme.



1. Menyelenggarakan program pembelajaran berkualitas tinggi dalam rangka penguasaan pengetahuan dan keahlian di bidang Keimigrasian yang berstandar internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian terapan berkualitas dalam rangka pengembangan dan penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang keimigrasian yang berwawasan global;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berkualitas tinggi dalam rangka penerapan pengetahuan dan keahlian di bidang Keimigrasian yang berstandar internasional;
4. Menumbuhkembangkan semangat bela negara sehingga terbentuk sikap insan imigrasi yang cendekia, inovatif percaya diri, peduli, serta bersahaja;
5. Melaksanakan program pelatihan dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan professional, pembelajaran; dan
6. Melaksanakan program pengasuhan dalam rangka membentuk jati diri peserta didik yang tanggap, tanggon, trengginas dan welas asih.

TUJUAN

“Penyelenggaraan Program Pendidikan Kedinasan Politeknik Imigrasi”

SASARAN

“Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Keimigrasian ”

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan 2020 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

| Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Target |
|---|--|--------|
| Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Keimigrasian | Persentase Lulusan Politeknik Imigrasi dengan Predikat Memuaskan | 80 % |
| | Persentase Lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. | 95 % |

Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM untuk Tahun 2020 sebesar **Rp.26.455.438.00**



Lampiran : Perjanjian Kinerja T.A 2020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI DENGAN
KEPALA BPSOM HUKUM DAN HAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggat Napitupulu, S.S., M.Si

Jabatan : Direktur Politeknik Imigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Min Ushen, S.H., M.H

Jabatan : Pt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala BPSOM Hukum dan HAM


Min Ushen
NIP.196903091994032001

Pihak Pertama
Direktur Politeknik Imigrasi


Anggat Napitupulu
197202031999031001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2020

Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Imigrasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan, dalam hal ini pada tahun anggaran 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pada Bab ini juga akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja Politeknik Imigrasi, aspek keuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait serta strategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum target kinerja tahun 2020 telah tercapai (Tabel 3.1) Hal ini terlihat dari indikator capaiannya kinerja sebagai berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Politeknik Imigrasi
Tahun 2020

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | Kinerja TA. 2020 | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Kinerja | | | Anggaran | | |
| | | Target | Realisasi | % | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Keimigrasian | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan | 80% | 100% | 100% | 26.455.438.000 | 25.788.703.084 | 97,48% |
| | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya | 95% | 100% | 100% | | | |
| | Total | 175 % | 200% | 200% | 26.455.438.000 | 25.788.703.084 | 97,48% |

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Poiteknik Imigrasi
Tahun 2019

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|---|---------------|-----------|-----------|
| 1 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan | 70% | 100% | 142,86% |
| 2 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya | 100% | 100% | 100% |
| RATA-RATA CAPAIAN POLITEKNIK IMIGRASI | | 99.46% | | |

Tabel 3.3
Perbandingan Target Kinerja Politeknik Imigrasi Tahun 2019 dan 2020

| Sasaran Program | Indikator Kinerja | | TK 2019 | TK 2020 | Keterangan | |
|--|---------------------------|---|---------------|---------------|------------|------|
| | | | | | Turun | Naik |
| Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang keimigrasian | 1 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya | 100% | 80% | | |
| | 2 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan | 70% | 95% | | |
| | PERSENTASE CAPAIAN | | 99.46% | 97.48% | % | |

KETERANGAN :

RK 2019 : Realisasi Kinerja Tahun 2019

RK 2020 : Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.4
Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Politeknik Imigrasi Tahun 2020

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | HASIL CAPAIAN | | TINDAK LANJUT |
|--|-------------------|---|---------------|----------------|---------------|
| | | | Berhasil | Tidak Berhasil | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki Kompetensi di bidang Keimigrasian | 1 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya | 80 % | | |
| | 2 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan | 95% | | |

B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Politeknik Imigrasi

Berdasarkan hasil penghitungan terhadap capaian kinerja Politeknik Imigrasi sebesar 95% dengan realisasi penyerapan anggaran Politeknik Imigrasi sebesar 97.48%. Turunnya angka capaian kinerja utama Politeknik Imigrasi karena adanya Bencana Nasional pandemi Covid-19. Analisa terhadap capaian indikator kinerja utama Politeknik Imigrasi pada Tahun Anggaran 2020 selengkapnya dapat dilihat dari capaian sasaran strategis Politeknik Imigrasi dibawah ini.

- 1 **Sasaran Strategis Pertama** : **Terpenuhinya lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan dengan predikat memuaskan**

Dalam rangka mencapai sasaran yaitu terpenuhinya lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan dengan mengukurnya melalui indikator yaitu Persentase Lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan dengan predikat memuaskan.

a) **Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan**

Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi terhadap 234 orang lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi pada Tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

- 37 orang atau 15,81% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi memperoleh predikat “Dengan Pujian”
- 165 orang atau 70,51% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi memperoleh predikat “Sangat Memuaskan”
- 32 orang atau 13,68% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi memperoleh predikat “Memuaskan”

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa lulusan Politeknik Imigrasi yang memiliki predikat minimal “memuaskan” sebanyak 13,68% atau 32 orang.

b) Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

Dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM khususnya dibidang Keimigrasian dan dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM berbasis teknologi informasi (*e-gov* PASTI Nyata) dibidang keimigrasian, dipandang perlu meningkatkan kualitas pendidikan kedinasan di bidang Keimigrasian. Peningkatan kualitas Pendidikan ini ditujukan agar lulusan dapat berkiprah sesuai dengan pendidikan yang selama ini dijalankan dan kompetensi yang dimiliki para lulusan.

b.1 Persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

Selain menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dibidang teknis dan kepemimpinan serta Fungsional dan HAM juga melaksanakan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi terhadap 234 orang lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi pada Tahun 2020 diperoleh hasil bahwa 100% alumni pendidikan Politeknik Imigrasi ditempatkan sesuai dengan kompetensinya yaitu di Kantor Imigrasi khusus TPI dan Kantor Imigrasi Khusus Non TPI, berikut rincian penempatan alumni pendidikan Politeknik Imigrasi selengkapnya:

- 37 orang atau 57,8% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta
- 4 orang atau 6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
- 4 orang atau 6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat
- 2 orang atau 3 % lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat

- 2 orang atau 3 % lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
- 2 orang atau 3,33% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
- 1 orang atau 1,56% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok
- 1 orang atau 1,56 % lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
- 9 orang atau 14% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi
- 5 orang atau 8,9% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 1 orang atau 1,56% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tangerang
- 1 orang atau 1,56% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Priok

Berdasarkan data diatas maka diketahui capaian persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya yaitu dilingkungan Imigrasi tercapai sebesar 95%, karena realisasi melebihi target (target 80%, realisasi 97.48%).

C. Kendala atau Hambatan dan Langkah Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Politeknik Imigrasi dalam pencapaian kinerjanya pada Tahun 2020 yaitu:

1. Adanya Pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja di tahun 2020.
2. *Disbursement Plan* yang telah disusun pada awal tahun.

Adapun langkah-langkah penyelesaian yang dapat kami sarankan dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam menghadapi Pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan kedinasan secara WFH (Work From Home) dan WFO (Work From Office) sehingga realiasi kegiatan tetap berjalan.
- 2) Meminimalisir jumlah revisi menjadi : Revisi POK atau DIPA : 4 (empat) kali dalam setahun (per triwulan)

D. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Politeknik Imigrasi

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terlebih khusus pada Politeknik Imigrasi yang menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan.

Untuk itu, Politeknik Imigrasi secara rutin melakukan survey terhadap kualitas pelayanan, yaitu survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Survey IPK (Indeks Persepsi Korupsi) baik yang dilakukan oleh Balitbang maupun yang dilakukan secara mandiri oleh Politeknik Imigrasi yang kemudian hasil dari survey tersebut dapat menjadi tolak ukur terhadap penyelenggaraan Pendidikan serta pelatihan yang telah dijalankan, juga bisa menjadi acuan untuk menilai apakah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sudah berjalan baik, efektif, efisien, cepat, tepat, dan professional? Serta tidak ada penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.

Survey ini juga digunakan untuk melihat IKM dan IPK terhadap kualitas pelayanan. IKM dan IPK adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu langkah rutin yang dilakukan Politeknik Imigrasi dalam menjaga kualitas mutu pelayanan yaitu melakukan survey IKM dan IPK yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.

Survey ini dilakukan terhadap civitas akademika Politeknik Imigrasi,

khususnya Peserta Didik guna memperoleh informasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Politeknik Imigrasi sebagai bahan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Didasari oleh Keputusan Menteri PAN-RB Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang telah ditetapkan, dan kemudian dikembangkan menjadi 12 unsur yang *relevant*, *valid* dan *reliable* yang merupakan unsur standar minimal sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Politeknik Imigrasi, antara lain:

1. Persyaratan pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Prosedur pelayanan adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan;
3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan;
4. Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan;
5. Produk/jasa spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut terhadap pengaduan, saran dan masukan;
7. Kejelasan petugas/pelaksana adalah keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan;
8. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman;
9. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
10. Maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan;
11. Keamanan dan kenyamanan sarana prasarana pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan dan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan;
12. Komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik.

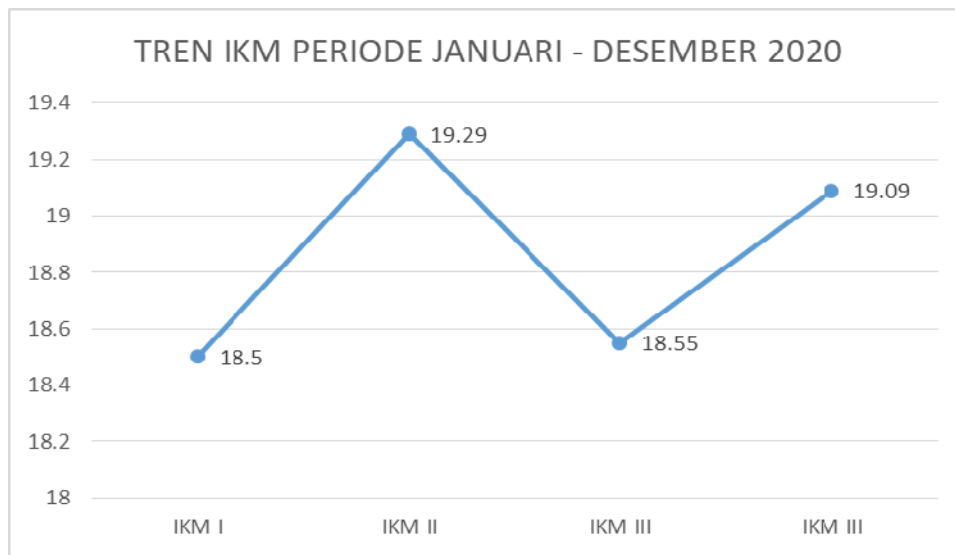
Penyusunan survei IKM dan IPK menggunakan kuesioner *online* sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan teknik pemberian kuisisioner dengan pengisian sendiri oleh responden. Survei ini dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020 dan didistribusikan secara *online* melalui *google form*.

Unsur Pelayanan IKM terdiri dari :

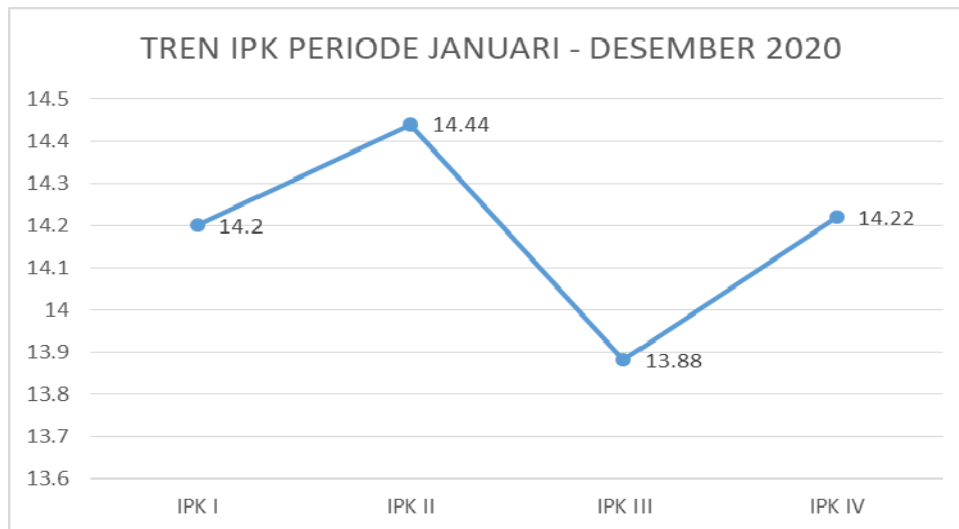
| | |
|------|--|
| KM1 | Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diperoleh dengan mudah |
| KM2 | Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat dipahami dengan jelas |
| KM3 | Persyaratan pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah |
| KM4 | Persyaratan pelayanan wajar dan sesuai dengan keperluan |
| KM5 | Informasi tentang prosedur/alur pelayanan dipahami dengan jelas |
| KM6 | Prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah |
| KM7 | Prosedur/alur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan |
| KM8 | Informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas |
| KM9 | Pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan |
| KM10 | Informasi waktu penyelesaian pelayanan diketahui dengan jelas |
| KM11 | Pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan |
| KM12 | Informasi tentang biaya pelayanan berbayar atau gratis diketahui dengan jelas |
| KM13 | Informasi tentang unit penerima pembayaran diketahui dengan baik |
| KM14 | Informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas |
| KM15 | Seluruh Produk /jasa layanan berfungsi dan mudah diakses |
| KM16 | Petugas Petugas pelayanan memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan |
| KM17 | Petugas pelayanan bertanggung jawab atas aplikasi pelayanan akurat |
| KM18 | Pelayanan memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang memadai secara manual dan sistem aplikasi |
| KM19 | Petugas cepat dan responsif |
| KM20 | Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center) jelas dan mudah diakses |
| KM21 | Proses pengaduan mudah dilaksanakan |
| KM22 | Kemudahan sistem pelayanan online |

Unsur Pelayanan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terdiri dari :

| | |
|------|---|
| PK 1 | Prosedur/alur pelayanan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) |
| PK 2 | Petugas pelayanan tidak diskriminatif (SARA) |
| PK 3 | Petugas dalam memberikan pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang |
| PK 4 | Tidak terdapat praktek percaloan /perantara yang tidak resmi |
| PK 5 | Tidak terdapat pungutan di luar ketentuan yang resmi (pungutan liar) |
| PK 6 | Pelayanan yang diterima sesuai dengan daftar layanan yang tersedia |



Grafik 3.3
Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Politeknik Imigrasi
Periode Januari s.d Desember TA 2020



Grafik 3.4
Rekapitulasi hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Politeknik Imigrasi
Periode Januari s.d Desember TA 2020

E. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Politeknik Imigrasi

1. Analisis Capaian Politeknik Imigrasi (Poltekim)

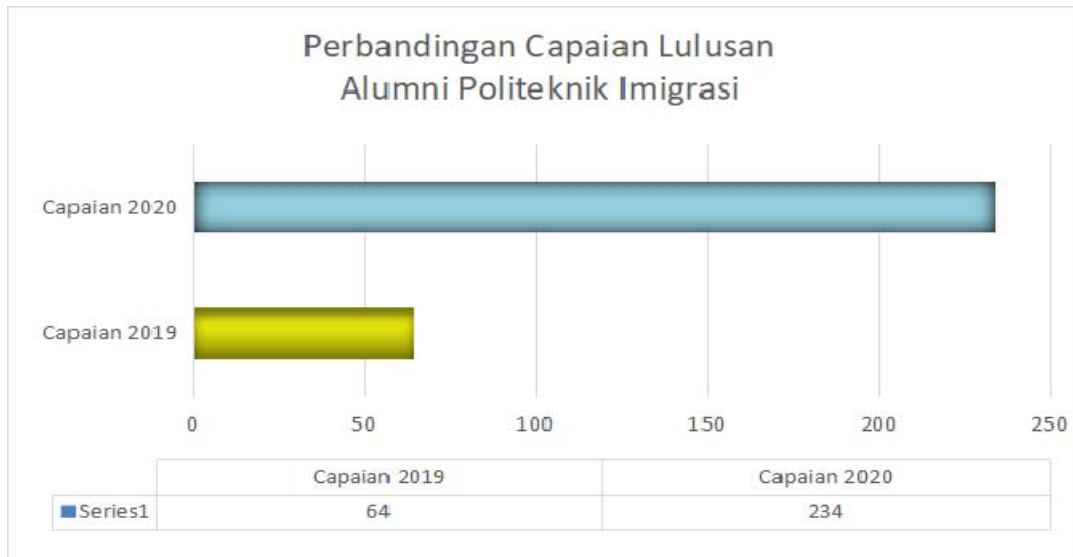
Tahun 2020 Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Politeknik Imigrasi (Poltekim) dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan Keimigrasian adalah :



Tabel 3.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Politeknik Imigrasi
(Poltekim) Tahun 2020

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | | TAHUN 2020 | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Kinerja | | | Anggaran | | |
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan di bidang Keimigrasian | 1 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan Predikat Memuaskan | 95% | 100% | 100% | 26.455.438.000 | 25.804.496.334 | 97,48 |
| | 2 | Persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang di tempatkan sesuai dengan | 80% | 100% | 100% | | | |
| TOTAL | | | 175% | 200% | 200% | 26.455.438.000 | 25.804.496.334 | 97,48 |

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Lulusan Alumni Politeknik Imigrasi
Tahun 2019 dan Tahun 2020



Analisa

1. Berdasarkan Tabel 3.4 di atas diketahui bahwa capaian kinerja Politeknik Imigrasi pada Tahun 2019 secara total sebesar 117,65% atau kinerja Poltekim tercapai karena realisasi kinerja Poltekim sebesar 200% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 170%, hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja. Berikut penjelasan penghitungan kinerja Politeknik Imigrasi:
 1. Berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi terhadap 64 orang lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi pada Tahun 2019 diperoleh hasil bahwa 100% alumni pendidikan Politeknik Imigrasi ditempatkan sesuai dengan kompetensinya yaitu di Kantor Imigrasi khusus TPI dan Kantor Imigrasi Khusus Non TPI, berikut rincian penempatan alumni pendidikan Politeknik Imigrasi selengkapnya:
 - 37 orang atau 57,8% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta

- 4 orang atau 6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
- 4 orang atau 6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat
- 2 orang atau 3 % lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
- 2 orang atau 3 % lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
- 2 orang atau 3,33% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
- 1 orang atau 1,56% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok
- 1 orang atau 1,56 % lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
- 9 orang atau 14% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 5 orang atau 8,9% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 1 orang atau 1,56% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tangerang
- 1 orang atau 1,56% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Priok

Berdasarkan data di atas maka diketahui capaian persentase lulusan Politeknik Imigrasi yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya yaitu di lingkungan Imigrasi tercapai sebesar 142,86%, karena realisasi melebihi target (target 70%, realisasi 100%).

2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 234 orang lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi pada Tahun 2020 diperoleh hasil bahwa 100% alumni pendidikan Politeknik Imigrasi ditempatkan sesuai dengan kompetensinya yaitu di Kantor Imigrasi khusus TPI dan Kantor Imigrasi Khusus Non TPI, berikut rincian penempatan alumni pendidikan Politeknik Imigrasi selengkapnya:

- 11 orang atau 4,7% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.
- 34 orang atau 14,5% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.
- 13 orang atau 5,6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.
- 13 orang atau 5,6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.
- 14 orang atau 6,0% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
- 11 orang atau 4,7% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.
- 12 orang atau 5,1% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.
- 6 orang atau 2,6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi
- 58 orang atau 24,8% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik

Imigrasi ditempatkan di Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

- 5 orang atau 2,1% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok.
- 8 orang atau 3,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
- 3 orang atau 1,3% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tangerang.
- 6 orang atau 2,6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung.
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi.
- 2 orang atau 0,9% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon.
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang.
- 4 orang atau 1,7% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Batam.
- 5 orang atau 2,1% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan.
- 5 orang atau 2,1% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya.
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.
- 2 orang atau 0,9% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makasar.
- 4 orang atau 1,7% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik

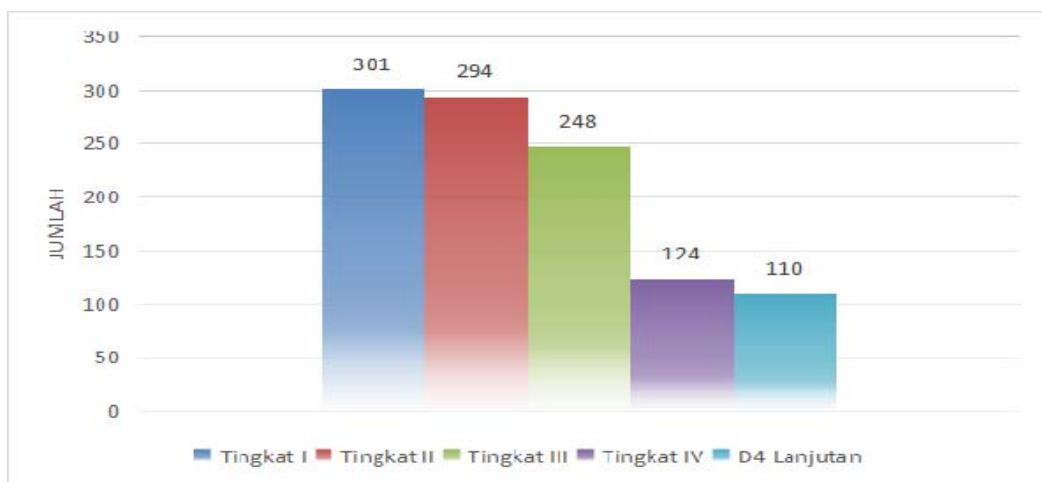
Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

- 2 orang atau 0,9% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang.
- 6 orang atau 2,6% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Yogyakarta.
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas II Entikong.
- 1 orang atau 0,4% lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Uban.

3. Grafik 3.4 diketahui perbandingan capaian lulusan Politeknik Imigrasi pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020, dimana pada Tahun 2020 lulusan Poltekim berjumlah 234, mengalami kenaikan kurang lebih 300% atau 170 orang lebih banyak dari jumlah lulusan Tahun 2019 yang sebesar 64 orang lulusan.

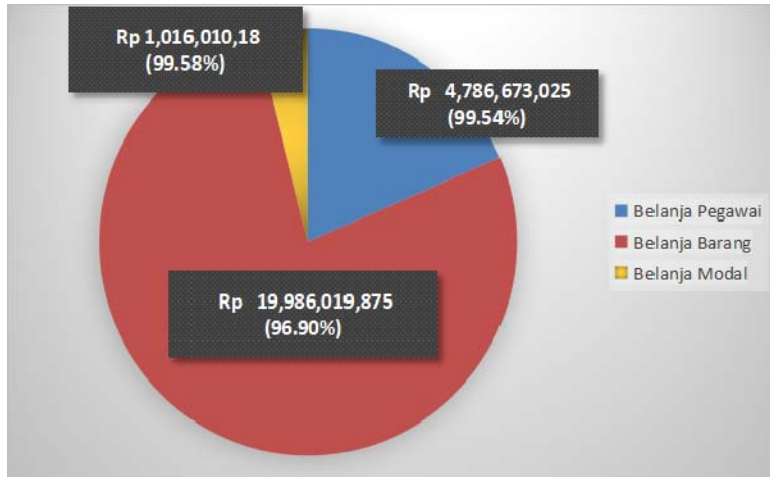
Berikut jumlah Taruna Politeknik Imigrasi pada Tahun 2020.

Grafik 3.5
Jumlah Taruna Poltekim Tahun 2020



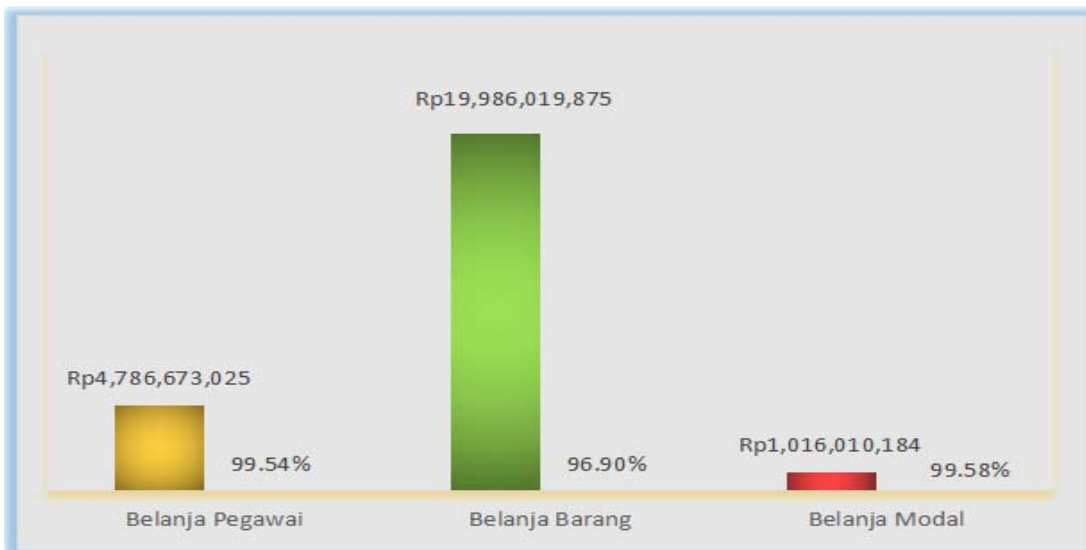
Pada capaian realisasi anggaran Politeknik Imigrasi tahun 2020, penyerapan anggaran sebesar Rp.25.788.703.084,- (97.48%) dari total pagu DIPA Rp. 26.455.438.000,-. Adapun rincian jumlah realisasi dari penyerapan anggaran Politeknik Imigrasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.6
Anggaran Belanja Politeknik Imigrasi Tahun 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 30 Desember 2020

Grafik 3.7
Realisasi Anggaran Per Belanja Politeknik Imigrasi Tahun 2020



sumber data : <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>

Grafik 3.8
Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
Politeknik Imigrasi Tahun 2020

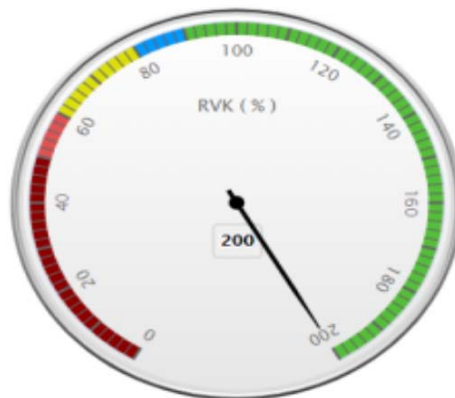


Keterangan:

- Rencana Penarikan Dana (awal)
- Rencana Penarikan Dana (revisi)
- Realisasi Anggaran

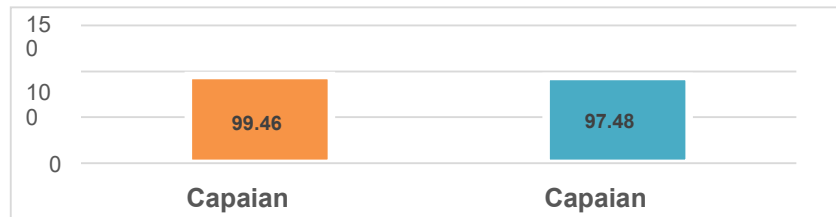
Realisasi Volume Keluaran

Tahun Anggaran: 2020



sumber data : <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/2020/index.php/satker>

Grafik 3.9
Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran Politeknik Imigrasi
Tahun 2019 dan Tahun 2020



Analisa :

- Berdasarkan tabel 3.5 tentang realisasi anggaran per satuan kerja diketahui realisasi anggaran Politeknik Imigrasi pada tahun 2020 sebesar Rp.25.788.703.084,- (97,48%) dari total pagu anggaran sebesar Rp.26.455.438.000,- .
- Berdasarkan grafik 3.7 tentang realisasi anggaran per belanja diketahui bahwa :
 - Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.786.673.025,- atau 99.54% dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp.4.808.788.000,-
 - Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.19.986.019.875,- atau 96.90% dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp.20.626.378.000,-
 - Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.016.010.184,- atau 99.58% dari pagu anggaran belanja barang sebesar Rp.1.020.272.000,-
- Berdasarkan grafik 3.8. tentang perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi anggaran diketahui bahwa Bulan September Tahun 2020 Pandemi *Covid-19* mempengaruhi kondisi penyerapan dalam masa *New Normal*.
- Berdasarkan grafik 3.9. diketahui realisasi anggaran Politeknik Imigrasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,02% (97.48%) jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Tahun 2019 yaitu sebesar 99.46% karena adanya Pandemi *Covid-19*.

F. Prestasi Kinerja Politeknik Imigrasi

Prestasi

1. Pembangunan Zona Integritas

POLTEKIM berhasil memperoleh prestasi sebagai salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2020 dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 934 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020.

2. Akreditasi

Program Studi Manajemen Teknologi dan Informasi Keimigrasian POLTEKIM mendapatkan akreditasi dari BAN-PT. Dan juga telah *mensubmit* data dukung untuk 2 (dua) prodi lainnya yaitu Prodi Hukum dan Prodi Administrasi untuk perolehan akreditasi selanjutnya.

3. Reaktivasi





Pada tanggal 12-13 Nov 2020 telah dilakukan reaktivasi ruang laboratorium bahasa dan laboratorium praktek keimigrasian dengan melakukan instalasi perangkat lunak (*software*) dan penambahan perangkat keras (*hardware*) oleh tim Direktorat Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kebutuhan praktikum atau praktek kemigrasian bagi dosen maupun peserta didik Poltekim. Kedua ruangan tersebut sudah dapat berfungsi optimal dan telah di lakukan visitasi oleh Ka.Badan dan Direktur Poltekim.







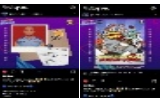




4. Bidang Olah Raga

| Kompetisi | Cabang OR | Prestasi | Nama Peserta |
|--|---------------------------|----------|---------------------------|
| Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan 2020 (OPTK) | Atletik Putra 100m | Juara 2 | Derry Darmawan Lubis |
| | Atletik Putra 200m | Juara 2 | Muhammad Haris Rohmansyah |
| | Silat Seni Tunggal Putra | Juara 3 | Ajrun Kabir |
| | Silat Kelas E Putra | Juara 3 | Ajrun Kabir |
| | Silat Kelas C Putra | Juara 1 | Zhulvan Fuad Arafad |
| | Silat Kelas C Putri | Juara 1 | Bening Ayu Intan |
| | Karate Kata Tunggal Putri | Juara 1 | Ayuni Widho |
| | Karate Kumite U-68 Putri | Juara 3 | Ayuni Widho |
| | Karate Kumite U-67 Putra | Juara 3 | Giovany Napitupulu |
| | Karate Kumite U-61 Putri | Juara 1 | Zeleta Feba |
| | Karate Kumite U-68 Putri | Juara 3 | Elsa Nanda Shabrina |
| | Taekwondo Under 55 Putra | Juara 3 | Ardhiansyah |
| | Taekwondo Under 58 Putra | Juara 3 | Bima Pradja Zebua |

| | | | |
|--|--------------------------|---------|--|
| | Taekwondo Under 74 Putra | Juara 3 | Aditya Satyagraha |
| | Taekwondo Under 55 Putri | Juara 3 | Karina Rachmawati |
| | Taekwondo Under 62 Putri | Juara 1 | Annisa Nuril Ikhtiram |
| | Tunggal Speech | Juara 2 | Nurfaizah Annisa |
| | Sepak Bola Putra | Juara 2 | Alfandy Adlytama M Draja Pratama Tri Yulianto Muhammad Fikri Nurya Enrico Yudistira Ary Rezqy Hakim A Muh Syaquil A Rodjosh Tobing Samuel Budi Santoso Dwi Prasetyo Delvi Adri Rahmadana Oky Sabastian M Dewa Gian Sambada Adam Syah Habibi Rizky Aprilia W Warisul Ambia Abbel Maulana Javier Saviola Wildo Ferondinata Yahya Nuur Zaman |

5. Bidang Kesenian dan Keterampilan Berbahasa

| No. | Nama Lomba | Nama Peserta | Prestasi | Dokumentasi |
|-----|-------------------------------------|--|------------------|--|
| 1. | Lomba essay Nasional IYIP | Muhammad Azzam Alfarizi Rafsanjani Is Marus | Juara 1 |   |
| 2. | Lomba LKTI Universitas Brawijaya | Agung Joko P. Frissilya Angelina Putu Maha Permana | Juara 1 | |
| 3. | Lomba poster Peradaban Official | Melina Tri Asmara | 10 Besar Terbaik |  |
| 4. | Video Creative Competition 2020 | Putu Maha Permana | Juara 2 | |
| 5. | Desain Poster Nasional | Raden Yohanes Dhimas Agung | Juara 2 | |
| 6. | Lomba Sketsa cultural art BEM FH UI | Muhamad Dafaburhani Rifan Melina Tri Asmara | 10 Besar Terbaik |  |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 7. | Lomba Video Creative Competition Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 | Putu Maha Permana A. Della Dinda Bevani M. Dafa Burhan Josyia Eka Wiranata I Ketut Adi Wardana Reynald Christian Yoga Fauzan Renardi | Juara 2 |  |
| 8. | Lomba Muslimah Day PKN STAN Tahun 2020 | Feni Yuli Triani Dwi Nuryani Diah Woro A. Rahma Femi | Juara 1 Videogram Dakwah Juara Favorit Videogram Dakwah |  |
| 9. | Lomba Video Competition Kedutaan Besar Tiongkok Tahun 2020 | Putu Maha Permana A. Agung Joko Prasetyo Frissilya Angelina Gede Maha Aditya Pramana | Juara Fan Favorit |  |
| 10. | Lomba Poster Digital UNJ Tahun 2020 | Kevin Yudhistira Sugianto | 12 Besar Terbaik |  |
| 11. | Lomba Lampung Overland Various English Competition Tahun 2020 | Sabina Devi | Juara Favorite of Varsity Speech |  |
| 12. | Lomba Political Event Tahun 2020 | Felix Ferdin Bakker Muhammad Alvi Ghazy Respati Triana Putri | 10 Besar Terbaik |  |
| 13. | Lomba Poster Porsimaptar Virtual Festival Event Tahun 2020 | Wisnu Muhammad Fauzi | Juara 2 |  |
| 14. | Lomba Essay Online Natonal Essay Competition 2020 | M. Azzam Alfarizi Rafsanjani Ismarus | 20 Besar Terbaik | |
| 15. | Lomba News Anchor Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2020 | Dessy Puspita Siagian | Juara 2 |  |
| 16. | Lomba FOKRI GAMES PTK Ke-VI Tahun 2020 | Achmad Setiawan Agus Saputra Zaki Ramadhan Nongindah Ika Yuna Setyaningtias Ridha Nikmatul M. Fido Brilian Muhammad Dafa Syafrina Binti Dinda Della Bevani Melysa Pujia Azhari Yoga Fauzan Renardi Diah Woro Ayuningtyas Hana Fortuna Kahfi Eki Cahyadi Melina Tri Asmara Febri Tursandi Arrasyid Farhan Satria Mardhani Herdian Zulfi Alvi Ghazi | Juara 1 Dai Ikhwan Juara 2 Podcast Ikhwan Juara 2 Lomba Essai Juara 3 Podcast Akhwat |    |

| | | | | |
|-----|---|---|---------|--|
| 17. | OPTK 2020 cabang LKTI TIM 3 | M Fahmi Pamungkas Agung Joko P M Rifki Ardhiansyah | Juara 3 | |
| 18. | OPTK 2020 cabang Fotografi Rally | Aldy Ferydian Basari Ahmad Fahmi Simamora Athallah Alvinur Wibowo M Rizal Syahroni Farhan Satria | Juara 2 | |
| 19. | OPTK 2020 cabang Sinematografi Film Terbaik | Putu Maha Aditya Permana Della Dinda Bevani Kadek Sintya Anjani Alief Heidar M Dafa Burhani I Ketut Adi Wardhana | Juara 2 | |



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020 ini adalah LAKIP perdana yang merupakan dokumen hasil pengukuran capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020 yang dapat digunakan sebagai pedoman dan hasil evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki dan kegiatan yang berbasis anggaran guna pencapaian realisasi kinerja yang optimal di lingkungan internal maupun eksternal Politeknik Imigrasi, yang artinya LAKIP ini berfungsi sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, dan mengukur kinerja kegiatan Poltekim

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran kinerja Poltekim Tahun 2020 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Hasil yang dicapai pada tahun 2020 tentunya masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang sehingga tuntutan peningkatan performa layanan yang semakin tinggi dapat direspon dengan baik.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar program dan kegiatan dalam perencanaan dan penetapan kinerja serta akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan baik, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan Politeknik Imigrasi telah berupaya secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga pelayanan internal dan eksternal Poltekim dalam kerangka reformasi birokrasi demi terselenggaranya *good governance* dan sejalan dengan strategi *corporate university* Kemenkumham.

B. Rencana Tindaklanjut Capaian kinerja

Dari kesimpulan diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal, antara lain:

1. Meminimalisir jumlah revisi baik kegiatan maupun revisi anggaran menjadi 4 kali revisi agar program kegiatan penyelenggaraan pendidikan kedinasan dapat berjalan sesuai dengan kalender kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Menyusun perencanaan kerja yang lebih matang agar saat pra pelaksanaan dan pelaksanaan kerja lebih terarah sehingga capaian kerja lebih optimal;
3. Terhadap kinerja yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan dan koordinasi yang baik secara internal Poltekim maupun BPSDM, dan juga koordinasi eksternal dengan instansi terkait lainnya;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Melakukan inovasi di bidang akademik seperti adanya layanan *turn it in* guna menghindari timbulnya praktik *plagiarism* di kalangan peserta didik;
 - b. Mengoptimalkan sistem pengelolaan BMN yang baik;
 - c. Pimpinan melakukan arahan/pembinaan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dan budaya kerja sehingga tercipta *output* kerja yang optimal dengan *outcome* yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh semua pihak.

Diharapkan kedepannya Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM dapat mewujudkan peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan peserta didik Poltekim yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif sejalan dengan strategi *Corporate University* Kemenkumham sebagai organisasi pembelajar.

Salam pembelajar.

Depok, 30 Desember 2020
Direktur Politeknik Imigrasi

TTD

Anggiat Napitupulu
NIP. 197203091994032001